

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia memiliki pengaturan terhadap kegiatan serta tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam mencegah permasalahan tersebut Pemerintah membuat aturan khusus agar masyarakat tidak melakukan hal yang membuat tidak nyaman demi ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Viktor 2016, 22).

Peraturan merupakan instrument aturan yang secara sah diberikan kepada Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan di daerah. Aturan menurut kamus bahasa Indonesia merupakan suatu cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan supaya dituruti. Berdasarkan peraturan daerah Kota Padang nomor 1 tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum dalam pasal 17 ayat 2 dikatakan "dalam rangka penyelenggaraan tertib sosial, setiap orang atau kelompok orang dilarang, "mengamen, mengemis, menggelandang, berdagang asongan dan /atau membersihkan kendaraan pada fasilitas umum dan dilarang mengordinir orang untuk menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan".

Akan tetapi seiring berjalannya waktu masih ada yang ditemukan masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh pengemis yang terjadi di Pantai Purus Kota Padang. Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang menjadi pusat Pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan yang paling berkembang di wilayah Sumatra Barat. Perkembangan kota tersebut mengakibatkan timbulnya tuntutan kebutuhan masyarakat seperti sarana dan prasarana pelayanan Kota yang semakin meningkat

setiap tahunnya. Kota Padang semakin berkembang dan penduduknya juga semakin padat, sehingga tak jarang ditemukan permasalahan yang terjadi.

Kota Padang yang tidak bisa dilepaskan dari permasalahan yang sering ditemui dalam masyarakat yang melanggar peraturan yang mengakibatkan mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, seperti pengemis, hal ini dikarenakan faktor ekonomi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidupnya. Direktorat Rehabilitasi Tuna Sosial mengatakan pengemis merupakan “mereka yang tidak bekerja kecuali meminta-minta kepada orang lain dengan tutur kata yang halus, demi menarik perhatian orang lain dengan dalih apapun untuk mendapatkan belas kasihan dengan maksud memperoleh sesuatu” (Jakarta Depsos, 1997).

Dampak dari pengemis dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam beraktifitas. Dalam mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret salah satunya melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam menanggulangi pengemis di Pantai Purus Kota Padang, pemerintah setempat seharusnya bergerak cepat dalam menangani dan menertibkan kasus tersebut.

Dengan adanya pergerakan yang berkelanjutan, dalam menanggulangi pengemis di Pantai Purus Kota Padang peneliti berharap permasalahan ini dapat diminimalkan sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman, tertib dan nyaman dalam mengunjungi Pantai Purus Kota Padang. Pemerintahan yang efektif saat ini merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Efektivitas Pemerintahan mencerminkan sejauh mana sebuah Pemerintahan mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

dengan sumber daya yang tersedia. Hal ini tidak hanya berlaku untuk negara-negara besar, tetapi juga penting dalam skala lokal dan regional. efektivitas Pemerintahan berperan dalam membentuk tatanan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang berkelanjutan (Wu & Tham, 2023, 1-23).

Pentingnya efektivitas Pemerintahan mencuat terutama dalam konteks global yang semakin kompleks dan dinamis. Pemerintahan yang efektif memiliki dampak yang positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti peningkatan kualitas hidup, perlindungan hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan masalah-masalah sosial, serta mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai efektivitas Pemerintahan, perlu ada koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga Pemerintahan, keterlibatan masyarakat sipil, dan partisipasi aktif warga negara.

Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi landasan penting dalam menciptakan Pemerintahan yang efektif (Filindra 2022, 961-979 dan Handayani 2021, 32-40). Selain itu, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bijak serta pengelolaan sumber daya yang efisien juga merupakan komponen kunci dalam mencapai tujuan efektivitas Pemerintahan (Musabayana et al., 2022). Sehingga pada akhirnya, efektivitas Pemerintahan bukan hanya tentang seberapa besar kekuasaan sebuah Pemerintahan, tetapi lebih kepada bagaimana kekuasaan tersebut digunakan untuk kebaikan masyarakat dan menjaga keadilan sosial.

Dalam era globalisasi ini, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Pemerintahan semakin kompleks, sehingga penting untuk terus mengembangkan strategi dan metode yang dapat meningkatkan efektivitas Pemerintahan agar dapat merespon perubahan yang cepat dalam dunia saat ini (Shinohara 2023, 96). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara mendasar cara

Pemerintahan beroperasi di seluruh dunia. Era digital telah membuka peluang baru dan menghadirkan tantangan yang signifikan dalam mengelola negara dan melayani masyarakat. Dalam konteks ini, digitalisasi memegang peran yang semakin penting dalam transformasi Pemerintahan modern.

Melihat dari permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik melakukan penelitian yang telah dituangkan didalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “implementasi peraturan daerah Kota Padang nomor 1 tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum di Pantai Purus Kota Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian adalah:

1.3.1 Bagaimana keberadaan pengemis dalam kemiskinan multidimensi Kota Padang dan kaitannya dengan ketenteraman dan ketertiban umum?

1.3.2 Bagaimana Implementasi perda Kota Padang nomor 1 tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum dalam menangani dan menertibkan pengemis di Pantai Purus Kota Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mendeskripsikan keberadaan pengemis dalam kemiskinan multidimensi kota padang dan kaitannya dengan ketenteraman dan ketertiban umum

1.4.2 Untuk menganalisis Implementasi perda Kota Padang nomor 1 tahun 2025 tentang ketenteraman dan ketertiban umum dalam menangani dan menertibkan pengemis di Pantai Purus.

1.5 Signifikan Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas referensi dan memberikan kontribusi Serta pedoman bagi peneliti lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang pemerintahan mengenai pengemis yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Secara Praktis, manfaat penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan atau pengalaman bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya serta dapat memberikan saran atau masukan kepada aparaturnya seperti Dinas Sosial, dan Satuan Polisi Kota Padang, yang bertugas dalam menangani pengemis yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur merupakan metode penelitian yang mengumpulkan, menganalisa, dan merangkum data dari berbagai sumber tulisan, seperti buku, jurnal, artikel akademik, dan laporan penelitian, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik atau isu penelitian. Sasaran utama dari metode ini adalah untuk menemukan teori yang berkaitan, hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dan beragam sudut pandang, yang dapat membantu atau memperkaya penelitian yang sedang dilaksanakan. Untuk melengkapi landasan penelitian, maka Penulis merinci terlebih dahulu temuan dari peneliti-peneliti terdahulu yang relevan dengan topik yang sama untuk menjadi suatu pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyediakan beberapa hasil peneliti terdahulu untuk meninjau kajian materi yang akan di bahas yaitu:

1.6.1 Jurnal administrasi publik (JAP), yang ditulis oleh Eva Forwanti dan Ferry Setiawan tentang “implementasi kebijakan penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (perda Kota Palangka Raya No. 9 tahun 2012)” Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Dengan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan prosedur analisis kualitatif dengan teknik analisis data dari crasswell yaitu dengan cara mengarsipkan, membaca keseluruhan data, mengkode data, menerapkan hasil kodingan, menyajikan kembali dalam bentuk narasi dan menginterpretasi atau memaknai data (Forwanti, Setiawan 2022, 94). Penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Penelitian sebelumnya lebih menfokuskan wawancara hanya ke Dinas Sosial Saja mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2012, yang kedua, dan menanyakan apa Faktor penghambat dan pendukung kebijakan penanganan gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dengan mewawancarai Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), masyarakat dan pengemis. Penulis melakukan wawancara kepada Dinas Sosial, bagaimana keberadaan pengemis dalam kemiskinan multidimensi Kota Padang dan kaitannya dengan ketenteraman dan ketertiban umum, bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani Pengemis dan bagaimana solusi yang dilakukan dinas sosial dalam menangani Pengemis. Selanjutnya Penulis mewawacarai Satuan Polisi Pamong Praja, menanyakan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam

menertibkan Pengemis dan apa kendala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam menertibkan Pengemis. Penulis juga mewawancarai masyarakat, menanyakan apakah masyarakat terganggu dengan adanya Pengemis di Pantai Purus Kota Padang. Penulis juga mewawancarai langsung Pengemis di Pantai Purus Kota Padang, apa yang menyebabkan pengemis lebih memilih pekerjaan Mengemis.

- 1.6.2 Skripsi yang ditulis dan dibuat oleh Bahagia, dengan judul “Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh” Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa penelitian lapangan (field research), secara pertimbangan karena pendekatan ini bersifat terbuka. Peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat mencari suatu kasus secara mendalam dan menggambarkan hipotesis dengan tulisan (kata-kata). Metode ini biasanya mulai dengan membahas suatu kasus tertentu serta memiliki arti yang sangat penting (Raco, 2010, 50). Pendekatan kualitatif digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, bermaksud untuk mengetahui lebih dalam tentang Peran Dinas Sosial dalam penanganan gepeng di Kota Banda Aceh. Berharap dengan pendekatan kualitatif, peneliti mendapatkan hasil penelitian yang akurat serta mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya secara jelas. Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya terdapat perbedaan dengan penulis teliti, penulis akan lebih menfokuskan bagaimana Pelaksanaan Dinas sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, dalam menangani dan menenteramkan Pengemis yang ada di Pantai Purus Kota Padang dan bagaimana keberadaan pengemis dalam kemiskinan multidimensi Kota Padang dan kaitannya dengan ketenteraman dan ketertiban umum.

1.6.3 Jurnal Tatapamong, hasil penelitian yang menggunakan studi kepustakaan yang ditulis oleh Allisa Akhidatul Idza tentang “gelandangan dan pengemis dalam konteks ketenteraman dan ketertiban umum: analisis dampak dan solusi”

Purwono (2008) menyebutkan bahwa studi kepustakaan adalah kumpulan informasi yang dikumpulkan oleh peneliti terkait dengan tema atau permasalahan yang sedang dianalisis. Menurut (Zed 2004, 145-146). Studi kepustakaan memiliki beberapa karakteristik; pertama, fokus penelitian adalah pada dokumen atau data tertulis ketimbang pengalaman lapangan atau pengamatan langsung. Kedua, bahan pustaka tersedia untuk digunakan, sehingga peneliti dapat memanfaatkan sumber yang sudah ada di perpustakaan tanpa harus pergi ke tempat lain. Ketiga, sumber informasi biasanya bersifat sekunder, berarti peneliti mengandalkan data yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan bukan berasal dari pengamatan langsung di lokasi. Terakhir, kondisi pustaka tidak terikat oleh tempat dan waktu, memberikan keleluasaan untuk mendapatkan informasi dari berbagai konteks dan periode tanpa batasan yang signifikan. Sumber informasi dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal. Alat yang digunakan dalam penelitian adalah daftar check list klasifikasi bahan penelitian. Untuk menganalisis data, metode yang diterapkan adalah analisis isi. Fokus dari penelitian ini adalah pada tunawisma dan pengemis dalam konteks pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umumnya di Indonesia. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang kondisi tunawisma dan pengemis secara keseluruhan, tanpa terfokus pada kabupaten atau kota tertentu sebagai lokasi penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan yang pertama kali dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang luas mengenai

dampak dan solusi terkait tunawisma dan pengemis dalam konteks pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam Penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan Penulis lakukan, Penelitian sebelumnya menggunakan studi ke Pustaka mendapatkan data melalui dokumen atau data tertulis seperti artikel, jurnal dan sejenisnya, yang tidak langsung kelapangan atau pengamatan langsung, dan fokus dari penelitian ini adalah pada tunawisma dan pengemis dalam konteks pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umumnya di Indonesia. Sedangkan penulis akan lebih memfokuskan penelitian pengemis ditingkat Kota/Kabupaten, penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode kualitatif yang akan langsung kelapangan dan lebih memfokuskan mewawancarai Dinas Sosial, bagaimana keberadaan pengemis dalam kemiskinan multidimensi Kota Padang dan kaitannya dengan ketentraman dan ketertiban umum, Penulis juga akan mewawancarai pihak Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja, bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani pengemis di Kota Padang terkhusus di Pantai Purus Kota Padang, dan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis serta bagaimana solusi yang akan dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani dan menenteramkan pengemis di Kota Padang, khususnya di Pantai Purus Kota Padang. Penulis juga akan mewawancarai Masyarakat sekitar bagaimana kelulahan mereka terhadap pengemis. Penulis juga akan langsung mewawancarai pengemis menanyakan apa penyebabnya pengemis lebih memilih pekerjaan mengemis.

- 1.6.4 Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan, yang ditulis oleh Imanuel Jaya, judul “implementasi kebijakan penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan di Kota

Palangka Raya” jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang tujuannya untuk menguraikan, menerangkan dan menjelaskan secara mendalam tentang keadaan yang terjadi di lapangan tanpa ada rekayasa. Sebagaimana yang dimaksud menurut (Sugiyono 2013, 291) masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, Relatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Sehingga penelitian mengenai Implementasi kebijakan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan ini perlu di eksplorasi lebih mendalam dan alamiah atau natural untuk mengembangkan Teori yang sudah ada sebelumnya. Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Palangka Raya yang mana sebagai implementator kebijakan dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Dengan pertimbangan kondisi wilayah ini memperlihatkan adanya berbagai masalah dalam penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan. Sejak dikeluarkannya Perda No. 09 tahun 2012 mengenai Penanganan Gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan kebijakan ini masih belum berjalan maksimal bahkan keberadaan mereka semakin banyak memenuhi kota yang memiliki slogan sebagai ‘Kota Cantik’. Dalam melakukan analisis data Penulis menggunakan analisis data oleh Sugiyono. Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2015, 87). Teknik Analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah model teknik analisis Interaktif yaitu melalui Reduksi Data,

Display Data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian sebelumnya lebih fokus tentang bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani pengemis tetapi tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengemis, sedangkan penelitian yang penulis lakukan terfokus kepada Dinas Sosial Dan Satuan Polisi Pamong Praja, penulis akan wawancarai bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Dinas Sosial dalam menangani pengemis dan bagaimana cara Pelaksanaan Satuan Polisi pamong Praja dalam menertibkan pengemis di lapangan.

- 1.6.5 Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, yang ditulis oleh Artha L. Tobing, Jonson Rajagukguk, Maringan Panjaitan, dan Juli Tiarma Sihalo. Judul “implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2003 tentang larangan gelandangan dan pengemis serta praktek susila dalam rangka penanganan gelandangan di Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan atau tantangan dalam implementasi kebijakan penanggulangan Gelandangan di Dinas Sosial Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan adapun sumber data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen serta pengamatan secara langsung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan penanganan Gelandangan di Kota Medan yang menyebabkan Gelandangan masih terdapat di kota Medan meskipun program program penanganan sudah dilaksanakan. Dari segi insfrakstruktur yang ada,Dinas Sosial kota Medan sangat membutuhkan rumah rehabilitas sebagai tempat penampung gelandangan, Rumah rehabilitasi tersebut sampai sekarang masih

belum rampung pembangunannya dikarenakan anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19, Pandemi Covid-19 juga tentu menjadi tantangan dalam penanganan gelandangan di kota Medan karena harus berpedoman pada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Selain hal tersebut, juga keluarga yang melakukan pembiaran dan tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan keluarga sehingga menyebabkan anak dan gelandangan tersebut memilih untuk menjalani kehidupan di jalanan. Adapun rekomendasi kebijakan diharapkan dapat memperbaiki yang menjadi hambatan hambatan berjalannya program penanganan gelandangan di kota Medan, sehingga mekanisme dari kinerja Dinas Sosial Kota Medan berjalan sesuai dengan program awal. Penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, penelitian sebelumnya lebih terfokus kepada hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan Gelandangan di Dinas Sosial Kota Medan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokuskan bagaimana pelaksanaan dan solusi yang dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani serta menertibkan pengemis di Kota Padang.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Konsep Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan. Adapun implementasi pendapat para ahli yakni, menurut Usman mengemukakan pendapatnya tentang “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem (Usman, 2002). Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. “Implementasi juga dapat dikatakan sebagai cara yang dilakukan untuk perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif” (Setiawan, 2004).

Pengertian implementasi yang dikemukakan ini, dapat dikatakan bahwa implementasi merupakan proses untuk melaksanakan ide, atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Menurut Harsono, implementasi merupakan suatu cara yang digunakan seseorang untuk melaksanakan tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, Dalam rangka untuk pengembangan dan penyempurnaan suatu program (Harsono, 2002). Berdasarkan dari pengertian implementasi menurut pendapat ahli di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan yang telah berencana yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan aktifitas dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan tujuan yang maksimal.

1.7.2 Pengertian Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Beberapa ahli telah menjelaskan mengenai ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Menurut penjelasan dari Eviany dan Sutiyo, 55 ketenteraman berhubungan dengan keadaan mental, sementara ketertiban masyarakat menunjukkan adanya organisasi dan kepatuhan terhadap hukum, norma, serta kesepakatan di dalam situasi yang berubah-ubah (Eviany dan Sutiyo, 2023). Labolo berpendapat bahwa ketenteraman dan ketertiban membentuk lingkungan yang aktif, aman, dan teratur, yang mematuhi peraturan serta norma yang ada (Labolo 2016).

Situasi ini tidak terganggu oleh kerusakan, sehingga memungkinkan kegiatan yang terencana untuk mencapai kesejahteraan komunitas sesuai dengan norma yang berlaku. Kedua pendapat para ahli tersebut menegaskan pernyataan dari Suradinata bahwa ketenteraman dan ketertiban penting untuk menciptakan kondisi di mana Pemerintah dan masyarakat dapat beroperasi dengan aman, teratur, dan tertib

(Suradinata, 2013). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketenteraman mengacu pada suasana yang seimbang, tanpa gangguan atau kekacauan, serta memberikan perasaan aman dan tenang. Di sisi lain, ketertiban umum lebih terfokus pada kepatuhan dan aturan yang berlaku, norma sosial, serta kesepakatan bersama untuk memastikan kelancaran interaksi serta kehidupan kolektif dalam masyarakat.

1.7.3 Pengertian Penegakan hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum merupakan cara dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya peraturan hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku seperti hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Arliman s, 2017).

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan pendekatan yang diterapkan untuk mengumpulkan informasi, kemudian memproses informasi tersebut sehingga dapat menghasilkan data yang akurat untuk menyelesaikan masalah penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara

mengumpulkan data dari Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, masyarakat dan juga langsung dari pengemis, selanjutnya dilakukan dengan menganalisis data yang penulis lakukan terhadap Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja serta penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang paling penting dan menentukan kualitas serta validitas (kebenaran) hasil penelitian. Data yang dikumpulkan dengan metode yang tepat akan menjadi dasar kuat bagi analisis dan kesimpulan yang dihasilkan, sehingga mampu memberikan jawaban yang akurat terhadap permasalahan penelitian (Wasonowati et al 2014, 66-75). Penulis akan mengumpulkan data dengan cara langsung kelapangan, akan mewawancarai para pihak yang terlibat serta penanggung jawab terhadap pengemis seperti Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja serta masyarakat dan pengemis.

Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dalam Nugrahani, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Nugrahani, 2008). Maka dari itu penulis akan mewawancarai langsung Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, pengemis dan masyarakat untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Sumber data dari penelitian ini menggunakan metode empiris yang merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah”

(Waluyo 2002, 15-16). Maka dari itu penulis akan langsung menanyakan masyarakat yang berada di pantai purus kota padang, penulis akan mewawancarai masyarakat bagaimana penilaian mereka terhadap pengemis.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1.8.2.1 Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik individu maupun kelompok. Peneliti menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data primer, seperti wawancara, observasi, dan survei. Wawancara adalah metode yang umum digunakan untuk mengumpulkan data primer, di mana peneliti mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban mereka. Observasi juga merupakan metode yang efektif, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas atau kejadian tertentu yang terkait dengan variabel penelitian (Lince 2022, 38-49. Susiati et al. 2020, 8-23. Zulkifly et al., 2022, 61-79).. Maka dari itu penulis akan melakukan pengumpulan data langsung mewawancarai serta mengamati dan langsung kelapangan, bagaimana sebenarnya yang terjadi.

1.8.2.2 Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis,

artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah (Alir, 2005). Penulis juga akan mengambil sumber data dari buku, jurnal, buku, akademis, dan artikel sebagai pelengkap dalam penelitian yang penulis lakukan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah mencari informasi yang diperoleh dari objek penelitian yang sesungguhnya. Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menerapkan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

18.3.1 Wawancara merupakan proses pengambilan informasi untuk keperluan penelitian melalui sesi tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden atau individu yang diwawancarai, baik dengan atau tanpa pedoman wawancara. (Bungin 2005, 136). Wawancara yang dilakukan oleh penulis dilakukan secara leluasa dengan memanfaatkan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disusun (sebagai panduan wawancara) sesuai dengan isu yang ingin dicari solusinya, tanpa mengabaikan kemungkinan untuk menambahkan pertanyaan lain yang bersifat spontan terkait jawaban yang diberikan oleh responden. Penulis mengambil teknik wawancara tersebut karena ingin memperoleh data yang sah dan langsung dari pihak yang berhubungan yaitu Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, pengemis, dan masyarakat.

1.8.3.2 Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam pencarian data sekunder berupa dokumen dan literatur yang relevan dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan data lewat dokumentasi, peneliti mengumpulkan informasi dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti foto, pedoman profil Dinas Sosial dan Satuan Polisi Kota Padang, serta pedoman tentang tugas dan fungsi Dinas

Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja yang diambil dalam perda Kota Padang.

1.8.4 Analisis data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis hasil observasi, wawancara dan hasil lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan bagi orang lain (Muhadjir, 2000).

Deskriptif kualitatif adalah istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif (Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C., 2016). Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial (Polit & Beck, 2009, 2014). Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data Deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola pola yang muncul pada peristiwa tersebut (Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C., 2016).

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa penjas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut. Analisis Data Deskriptif Kualitatif Sebelum melakukan analisis data, peneliti seyogyanya melakukan teknik pengujian kepercayaan data yang akan dianalisis untuk dibuat kesimpulan penelitian. Teknik pengujian kepercayaan data yang digunakan oleh peneliti teknik triangulasi yaitu untuk menguji kepercayaan data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan berbagai cara. Pengujian kepercayaan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi

validitas dan reliabilitas serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul (Sugiyono, 2017).

Dalam proses triangulasi sebagai proses penguatan bukti dari hasil catatan di lapangan observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi pada suatu penelitian. Secara ringkas teknik triangulasi adalah upaya peneliti membandingkan data yang dihasilkan dengan menanyakan kepada orang-orang disekitar secara lisan tentang laporan tersebut guna memahami dan mengetahui permasalahan, selanjutnya membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan kemudian hasil dari penelitian itu digabungkan sehingga menjadi akurat dan saling melengkapi. Basrowi & Suwandi (2008) mengatakan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal, untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Sugiyono (2017) menyatakan analisis penelitian kualitatif telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian selesai. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.

1.8.5 Langkah Langkah Analisis Data Deskriptif Kualitatif

Langkah langkah analisis data deskriptif kualitatif melibatkan tiga tahapan yaitu reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan. Berikut peneliti paparkan satu persatu.

1. Reduksi Data, Reduksi data menekankan pada pemokusan data yang akan diambil oleh peneliti. Proses ini berlangsung sejak

awal pertanyaan penelitian dibuat sampai data penelitian dikumpulkan. Jadi pemokus data yang diambil oleh peneliti yaitu, pihak Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian peneliti juga akan mencari kebenaran penyebab pengemis mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, dengan cara mewawancarai pengemis itu sendiri, dan mewawancarai salah satu masyarakat.

2. Data display Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah, dalam penelitian deskriptif kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Tujuan mendisplaykan data untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
3. Penarikan Kesimpulan Sugiyono (2017) menjelaskan langkah ketiga dalam analisis data deskriptif kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan langkah ke tiga dalam analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa kesimpulan dalam penelitian deskriptif kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan ini dikarenakan sejak awal masalah dan rumusan masalah dalam penelitian deskriptif kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang

diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

